

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi suatu pokok bahasan yang akan selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin. Seperti halnya arus besar globalisasi yang membawa keleluasaan informasi menyebabkan fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berujung pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Sedangkan sebagai koordinator, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur harus sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menuntut terjadinya perubahan peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan orientasi dan pendekatan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Dalam pelaksanaan peran BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan, optimalisasi sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat, terarah, dan dapat dilaksanakan. Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran setiap program/kegiatan. Meskipun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan (termasuk belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*).

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi BAPPEDA menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan (2013-2018).

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**

Secara normatif, BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:

#### **1. Belum efektifnya pengendalian/koordinasi pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota**

Pengendalian dan koordinasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina hubungan saling pengertian/pemahaman dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai bidangnya masing-masing namun tetap memiliki tujuan yang sama. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada

prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu, fungsi koordinasi dalam perencanaan sangat penting untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas demi tercapainya target pembangunan daerah. Oleh karena itu, belum efektifnya pengendalian/koordinasi pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD kabupaten/kota menjadi kendala utama yang harus segera ditangani oleh BAPPEDA agar setiap tahapan penyusunan perencanaan menjadi efektif.

**2. Belum lengkapnya nomenklatur program & kegiatan yang mencerminkan permasalahan-permasalahan pembangunan dan layanan SKPD**

Dalam penyusunan program & kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah hendaknya dapat menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan serta layanan SKPD namun tetap memiliki relevansi dengan peluang-peluang yang ada. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lampiran A.7 diatur program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan dan layanan SKPD. Meskipun begitu, program dan kegiatan dalam lampiran A.7 tidak dapat lagi memecahkan permasalahan seiring terjadinya perubahan dinamika lingkungan strategis. Untuk itu, perlu adanya perbaikan nomenklatur program dan kegiatan yang mencerminkan permasalahan pembangunan dan layanan SKPD sehingga penyusunan perencanaan pembangunan lebih terfokus pada penyelesaian konflik yang sedang dan akan terjadi.

**3. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan dengan baik**

Kesiapan data/informasi sangatlah penting dalam perumusan Renstra SKPD karena data/informasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai bahan kajian/analisis untuk merumuskan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Agar dapat menghasilkan perencanaan ideal dan optimal, maka setiap penyusunan perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid dan terbaru.

Tanpa data/informasi yang akurat, maka perencanaan yang disusun tidak sepenuhnya tepat sasaran, mengalami pergeseran penentuan prioritas, kurang maksimal dalam pengambilan kebijakan, dan rentan pemborosan anggaran. Pada akhirnya, tujuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itulah ketersediaan data/infromasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan menjadi faktor penentu dalam penyusunan Renstra SKPD.

**4. Belum adanya kesatuan data untuk perencanaan pembangunan**

Setiap kegiatan dan program prioritas yang disusun setiap tahun merupakan hasil pemikiran dan analisis terhadap serangkaian atau sekumpulan data dan informasi yang relevan dengan sasaran pembangunan. Data dan Informasi tersebut umumnya didapatkan secara langsung dari kabupaten/kota melalui sistem informasi yang dibangun oleh direktorat atau melalui kajian ke daerah baik dibantu oleh pihak akademis maupun konsultan. Data dan informasi hendaknya memiliki keterkaitan satu sama lain agar pada saat masyarakat atau pihak yang berkepentingan memerlukan, data dapat diakses dengan cepat dan mudah.

**5. Belum tersedianya sistem informasi perencanaan secara optimal**

Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumber daya utama yang harus dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas perencanaan, serta yang tidak kalah pentingnya, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data dan bukti melalui *decision supporting system*.

**6. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya**

Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

**7. Belum optimalnya koordinasi antar bidang**

Salah satu tujuan dari koordinasi adalah sinkronisasi antar bidang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan dan layanan SKPD. Bidang-bidang harus saling bekerjasama dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya menyamakan langkah dan persepsi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kerjasama dan koordinasi harus dilaksanakan secara efektif agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai perencanaan. Namun, apabila koordinasi tidak dilaksanakan oleh bidang-bidang, maka fungsi bidang di BAPPEDA akan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

#### **8. Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan**

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia perencana pembangunan di BAPPEDA untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, BAPPEDA masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan aparatur pemerintah bersama rakyat dalam memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dan penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-masing dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggungjawab, dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan daerah maupun nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih berkualitas dan komprehensif.

#### **9. Belum dipahaminya perencanaan oleh masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi. Oleh karena itu, perencanaan penting untuk dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu, sehingga masyarakat dapat menuntut pemerintah daerah jika terdapat program pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Selain itu, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

**10. Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah**

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan,. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah.

**11. Belum terintegrasinya antara sistem perencanaan pembangunan daerah dengan sistem penganggaran dan sistem keuangan**

Keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi tidak hanya dibutuhkan antara aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga dilakukan antar satuan unit kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian program dan atau target hasil (*outcome*) suatu kegiatan menuju visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD. Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Sedangkan penetapan target-target kinerja di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dapat merujuk kepada target yang ditetapkan sesuai keputusan menteri dengan Indikator Kinerja Utama.

Tanpa perencanaan, satuan kerja cenderung tidak fokus dan tidak terarah dalam operasionalnya sehingga akan beroperasi secara sendiri-sendiri serta menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas. Sedangkan perencanaan yang matang dengan memperhatikan sistem penganggaran keuangan daerah akan mengoptimalkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### 3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan segala macam potensi sumber daya, kondisi sosial ekonomi maupun kewilayahan, permasalahan maupun konflik internal-eksternal, isu-isu masa depan yang menjadi tantangan, dan setiap peluang pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:

**"Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis  
Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan"**

Visi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam pengembangan generasi mendatang. Selain ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, visi pemerintah daerah juga difokuskan pada pengembangan lingkungan hidup. Kemudian, dengan memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan provinsi Kalimantan Timur dapat lebih berperan dalam membentuk perubahan positif di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

**Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.** Hal ini bertujuan untuk membentuk identitas dan karakter sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dalam mengembangkan pendidikan formal maupun informal.

- Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.** Hal ini bertujuan untuk mengelola sektor pertanian dalam arti luas dan nilai tambah dari sektor non migas sebagai pendukung program pembangunan daerah.
- Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.** Hal ini bertujuan untuk mendorong aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan daerah berbasis ekonomi.
- Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.** Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya serta memberi pelayanan publik yang prima, menciptakan kepastian hukum, dan akuntabilitas publik.
- Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.** Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu *“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif untuk Mencapai Kaltim yang Sejahtera dan Berkeadilan”* memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Keterkaitan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur itu terletak di Misi Keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 sehingga BAPPEDA berusaha memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.



Berdasarkan 11 permasalahan tupoksi BAPPEDA yang telah diuraikan di atas, terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut adalah **belum efektifnya pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD kabupaten/kota**. Jika pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD kabupaten/kota tidak efektif, maka pencapaian target sasaran RPJMD pun menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan rekapitulasi RPJMD kabupaten/kota akan sangat mempengaruhi pencapaian RPJMD Provinsi. Sedangkan faktor pendorong yang dapat memperkuat pencapaian Visi dan Misi Gubernur adalah **peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah**. Maksimalnya peran kelembagaan dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika global akan menentukan seberapa efektifnya perencanaan pembangunan daerah berlandaskan isu-isu strategis regional maupun nasional.

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota**

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, gelombang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin “pasang”. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan Bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi akan mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks di mana akan ada pilihan antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang akan memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut akan mencerminkan betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam

perencanaan pembangunan nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan sumber daya dan pelibatan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme kementerian/lembaga (K/L) yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada dasarnya memperhatikan:

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (*outcome*) program K/L dengan program prioritas Presiden;
- e. Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (*outcome*) program K/L; dan
- f. Sumber daya yang diperlukan.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra BAPPEDA kabupaten/kota, wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Pemekaran Kalimantan Utara
2. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
3. *Mainstreaming* ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
4. Pentingnya pengembangan agro-industri di masa depan;
5. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
6. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
7. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
8. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
9. Pencapaian MDG's; dan
10. Pencapaian MP3EI.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek

penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dari perekonomian berbasis migas dan pertambangan (*unrenewable*) menuju kepada industri berbasis pertanian dan lingkungan hidup (*renewable*). Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan, maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang provinsi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas dan pertambangan yang menjadi sektor unggulan provinsi untuk mendukung tujuan pembangunan Nasional serta memacu pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
2. Mengembangkan sektor unggulan untuk mengantisipasi menipisnya sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui sekaligus sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan regional;
3. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya; dan
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, dan sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan, dan keamanan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya terletak pada daerah rawan bencana alam; dan
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus, kebutuhan akan analisis daya dukung fisik Kawasan Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang, seperti:

- Alih fungsi lahan kawasan hutan untuk pemanfaatan kawasan budidaya terutama yang terkait dengan hutan lindung;
- Konflik pemanfaatan lahan pertambangan untuk pengembangan Kawasan Budidaya Permukiman; dan
- Ketersediaan sumber daya air yang terbatas untuk mendukung kegiatan budidaya yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terutama yang terkait dengan kegiatan industri.

Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah secara terpadu di Provinsi Kalimantan Timur.

Pola ruang kawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

Sebagian besar lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan BAPPEDA terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena permukiman yang ada meliputi

pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

Saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kantor pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kantor pemerintahan kecamatan dan kelurahan berada pada masing-masing wilayah, sedangkan kawasan perkantoran dinas-dinas/satuan kerja perangkat daerah tersebar di beberapa lokasi baik di wilayah utara, barat, tengah, dan selatan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan publik terutama jika dihubungkan dengan konsep pelayanan satu atap (untuk mempercepat dan mempermudah urusan perizinan dan pelayanan kepada masyarakat maupun investor). Hal tersebut merupakan faktor pendorong sisi positif dalam kaitannya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA**

BAPPEDA selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan “Kaltim sejahtera dan berkeadilan” sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Maksud dari peningkatan kualitas BAPPEDA adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

## **2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA**

BAPPEDA adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

## **3. Perencanaan yang matang**

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

## **4. Evaluasi kinerja yang maksimal**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan BAPPEDA. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan BAPPEDA terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

## **5. Penyajian data yang akurat**

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena

itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga *input* yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.